

## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Rizal Yaya<sup>1</sup>, Zulfaiq Shafiyya Hanifa<sup>2</sup>  
Email: [r.yaya@umy.ac.id](mailto:r.yaya@umy.ac.id)<sup>1</sup>, [zulfaiqhmf@gmail.com](mailto:zulfaiqhmf@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55183

### Abstrak

Studi ini memiliki fokus utama untuk menganalisis sejauh mana belanja pemerintah dan tingkat pembangunan manusia memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi dimasukkan sebagai variabel perantara. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan untuk periode tahun 2022 hingga 2023, mencakup indikator belanja pemerintah, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup penelitian mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa, dengan total populasi sebanyak 226 daerah. Melalui teknik purposive sampling, sebanyak 113 kabupaten/kota dipilih sebagai sampel penelitian. Kajian ini berlandaskan pada teori Wagner serta teori dari Peacock dan Wiseman, dan merumuskan enam hipotesis yang dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 12 SV. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, belanja pemerintah terbukti tidak memengaruhi kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui jalur tidak langsung. Indeks pembangunan manusia berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat, namun pertumbuhan ekonomi tidak mampu bertindak sebagai mediator dalam hubungan antara indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi**

### Abstract

*This study focuses primarily on analyzing the extent to which government spending and human development levels contribute to social welfare, with economic growth included as an intermediary variable. This study utilizes secondary data collected for the period 2022 to 2023, covering indicators of government spending, human development index, economic growth, and social welfare levels. The scope of the study covers all districts/cities in Java Island, with a total population of 226 regions. Through purposive sampling technique, 113 districts/cities were selected as research samples. This study is based on Wagner's theory and the theory of Peacock and Wiseman, and formulates six hypotheses that are analyzed using EViews 12 SV software. The findings in this study indicate that government spending does not have a significant impact on economic growth. On the other hand, the human development index shows a positive effect on economic growth. On the other hand, government spending is proven not to affect social welfare, either directly or through indirect channels. The human development index contributes positively to social welfare, but economic growth is unable to act as a mediator in the relationship between the human development index and social welfare.*

**Keywords : Human Development Index, Community Welfare, Government Expenditure, Economic Growth.**

### PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sangat krusial, khususnya melalui implementasi kebijakan fiskal seperti belanja publik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, maraknya praktik korupsi telah menimbulkan gangguan terhadap efektivitas alokasi anggaran negara, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah, sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan negara, memiliki tanggung jawab mendasar untuk menjamin kualitas hidup warga negara melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial (3). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan bahwa pemanfaatan kekayaan negara harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, penggunaan dana publik perlu diarahkan untuk memperkuat program bantuan sosial (33). Dalam menghadapi berbagai persoalan sosial seperti ketimpangan akses pendidikan dan kesenjangan ekonomi, negara memiliki kapasitas untuk merespons melalui pengelolaan sumber daya yang optimal (1). Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan ukuran konsumsi rumah tangga sebagai dasar penetapan garis kemiskinan, di mana seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluarannya berada di bawah ambang batas tersebut.

Pulau Jawa, yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional serta pusat administrasi dan pendidikan, mencatat jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa mencapai 13,62 juta jiwa. Meskipun persentase kemiskinan di Pulau Jawa relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain seperti Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, angka absolutnya tetap mencolok. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat dominasi Pulau Jawa dalam berbagai aspek pembangunan.(42). Dari sisi ekonomi, Pulau Jawa memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yaitu sebesar 57,05% pada tahun 2023. Namun, laju pertumbuhan ekonomi di wilayah ini tercatat sebesar 4,96%, yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kalimantan (5,43%) dan Sulawesi (6,37%).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pulau Jawa memiliki peran dominan dalam perekonomian nasional, tantangan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan masih perlu mendapatkan perhatian khusus.(41). Berdasarkan data (5), sebanyak 13,62 juta penduduk miskin tercatat tinggal di Pulau Jawa pada tahun 2023. Walaupun persentase kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain seperti Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, angka absolutnya tetap mencolok. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat dominasi Pulau Jawa dalam berbagai aspek pembangunan. Selain itu, tren penurunan kemiskinan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan mulai memberikan dampak positif. Data BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 26,50 juta orang pada September 2021 menjadi 25,90 juta orang pada Maret 2023. Namun, perubahan kecil dalam angka kemiskinan di wilayah berpenduduk padat seperti Jawa tetap signifikan secara nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas pengeluaran pemerintah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (39).

Pengeluaran pemerintah sendiri mencerminkan penggunaan anggaran negara untuk mendukung kepentingan publik, meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah, serta memperkuat kapasitas masyarakat (26). Pengeluaran ini mencakup belanja yang dikelola baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah (31). Komitmen negara terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat terefleksi dalam alokasi anggaran pada sektor-sektor esensial seperti pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur (13). Di sisi lain, kualitas hidup masyarakat juga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menggabungkan indikator pendidikan, pendapatan, dan kesehatan (10).

Menurut pandangan Wagner dalam teori hukum Wagner, peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan riil masyarakat akan diikuti oleh perluasan fungsi pemerintah, termasuk dalam hal pengeluaran fiskal (25). Sejalan dengan itu, (44) teori Peacock-Wiseman menyoroti bahwa pengeluaran pemerintah cenderung meningkat dari waktu ke waktu, didorong oleh tekanan kebutuhan publik dan didukung oleh kapasitas fiskal melalui pendapatan daerah, termasuk pajak daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (28).

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas keterkaitan antara belanja publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap kesejahteraan sosial (22). Sementara itu, pengeluaran pemerintah memiliki korelasi positif, namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (9). Di sisi lain, mengenai konteks Amerika Serikat mengungkap bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan sosial, karena alokasi dana yang tidak tepat justru cenderung menjadi inefisiensi atau pemborosan (33). Selain itu, tingginya indeks pembangunan manusia (IPM) dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang baik memiliki produktivitas lebih tinggi (16).

Pengeluaran negara, atau yang umum disebut belanja publik, merujuk pada pemanfaatan dana dan sumber daya negara untuk mendanai aktivitas pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi negara serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (15). Dalam konteks teori Wagner dan Weber, disebutkan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita secara teoritis akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran pemerintah. Teori ini bertumpu pada pendekatan organisasi, yang memandang pemerintah sebagai entitas independen dari masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan jarak antara negara dan warga negara karena kurangnya dasar kepemilikan bersama terhadap barang publik (3). Meski Wagner tidak merumuskan model matematis, konsep dasarnya menekankan hubungan jangka panjang antara skala aktivitas pemerintahan dan perkembangan ekonomi (29). (43) Teori Peacock dan Wiseman melengkapi pandangan ini dengan menekankan bahwa dalam kondisi ekonomi normal, meningkatnya produk nasional bruto (GNP) akan memperbesar pendapatan negara, yang secara otomatis berdampak pada peningkatan belanja publik (4). Teori ini juga menyoroti pentingnya fleksibilitas fiskal dalam perencanaan dan implementasi anggaran. Dengan mengalokasikan pengeluaran pada sektor-sektor yang meningkatkan IPM, pemerintah dapat memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini bertindak sebagai mekanisme transisi, yang mengonversi investasi dalam pembangunan manusia menjadi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (40).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan total output barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui besarnya kontribusi masing-masing sektor dalam menghasilkan output (6). Dalam teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, pertumbuhan ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu kekayaan sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, dan akumulasi modal (16). Artinya, ekspansi ekonomi akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita (3).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator kunci dalam menilai capaian kualitas hidup suatu populasi. Konsep ini awalnya diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz pada dalam kerangka pemikiran tentang *Human Capital Investment*, yang menekankan pentingnya pembiayaan pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan sebagai faktor utama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (2). Lebih lanjut, (34) ditegaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja dengan tingkat upah yang layak, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial (11). Dalam konteks regulatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar baik secara material, spiritual, maupun sosial, sehingga masyarakat dapat berkembang secara optimal dan menjalankan peran sosialnya secara produktif (30).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kuantitatif dengan pemanfaatan data sekunder sebagai sumber utama. Data yang digunakan meliputi laporan realisasi belanja pemerintah daerah tahun 2022 hingga 2023, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan untuk periode yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta indikator kesejahteraan masyarakat pada tingkat kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa. Seluruh data diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) dan portal resmi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wilayah administratif kabupaten dan kota di Pulau Jawa selama dua tahun pengamatan, yaitu 2022 dan 2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan non-probabilistik, menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu wilayah yang memiliki data lengkap mengenai realisasi belanja pemerintah daerah, IPM, pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, serta data mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak tergolong miskin.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis data dilakukan melalui metode regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak EViews versi 12 SV, serta pengujian efek mediasi menggunakan metode Sobel Test untuk menghitung standard error dari pengaruh tidak langsung (*indirect effect*). Data numerik yang dikumpulkan dari BPS dan Kementerian Keuangan kemudian diinput untuk dianalisis secara statistik.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui persentase penduduk yang tidak tergolong miskin. Perhitungan dilakukan dengan rumus: Tingkat Kesejahteraan Masyarakat = 100% - Persentase Penduduk Miskin. Data ini diperoleh dari publikasi resmi BPS.

Sementara itu, variabel independen yang dianalisis meliputi pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia. Belanja pemerintah dinilai sebagai instrumen yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (26). Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah diukur berdasarkan data panel realisasi belanja daerah pada level kabupaten/kota di Pulau Jawa untuk periode 2022–2023, yang datanya diperoleh melalui portal resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

$$\text{Rasio Realisasi Belanja Pemerintah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator komposit yang mencerminkan tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM dihitung dengan menggabungkan indikator-indikator seperti harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Data IPM biasanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau United Nations Development Programme (UNDP). Nilai IPM dinyatakan dalam skala 0-100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan pembangunan manusia yang lebih baik. Rasio Realisasi Penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variable mediasi. Secara teori, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan diperlukan. Untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi dengan:

$$PE = \frac{PDRB(t) - PDRB(t-1)}{PDRB(t-1)} \times 100\%$$

Dengan rincian sebagai berikut :

PDRB (t) = PDRB menurut harga konstan pada tahun t

PDRB (t-1) = PDRB menurut harga konstan pada tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Data diperoleh dari laporan resmi Badan Pusat Statistika (BPS).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten dan kota yang berada di wilayah Pulau Jawa sebagai unit analisis. Periode waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tahun 2022 hingga 2023, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang relevan terhadap kondisi terkini. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang didasarkan pada kriteria tertentu, sehingga diperoleh sebanyak 113 entitas pemerintahan daerah yang memenuhi syarat untuk dianalisis.

Hasil dari analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel terikat, yaitu Kesejahteraan Masyarakat (Y), berdasarkan 226 observasi, memiliki nilai minimum sebesar 78,240—tercatat pada Kabupaten Sampang pada tahun 2023—dan nilai maksimum sebesar 97,620 yang ditemukan di Kota Depok pada tahun yang sama. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah sebesar 90,33367.

Sementara itu, dua variabel bebas yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Pemerintah (X1) dan Indeks Pembangunan Manusia (X2). Untuk Pengeluaran Pemerintah (X1), nilai minimum tercatat sebesar 0,560 di Kota Banjar pada tahun 2023, sedangkan nilai maksimum sebesar 19,230 terjadi di Kabupaten Serang pada tahun yang sama. Nilai rata-rata dari X1 adalah 3,269867.

Adapun variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) memiliki rentang nilai antara 63,390—yang terjadi di Kabupaten Sampang pada tahun 2022—hingga nilai tertinggi 88,610 yang dicapai oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2023. Rata-rata dari variabel ini tercatat sebesar 73,84934.

Variabel mediasi, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (M), digunakan untuk melihat peran perantara dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah dan IPM terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis deskriptif, nilai minimum pertumbuhan ekonomi adalah -7,160 yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022, sedangkan nilai maksimum sebesar 8,760 tercatat di Kabupaten Indramayu pada tahun 2023. Rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari seluruh sampel adalah sebesar 3,989823.

**Tabel 1. Hasil Uji Chow Persamaan I**

Effect Test	Statistic	d.f.	Probability
<b>Cross-section F</b>	2.313971	(112,112)	0.0000
<b>Cross-section Chi-Square</b>	272.198465	112	0.0000

Berdasarkan Tabel 1 pada hasil uji chow persamaan I, *common effect model vs fixed effect model* diatas, diperoleh nilai probabilitas (P-value) *cross section* sebesar  $0.0000 < 0.05$  maka H0 ditolak dan H1 diterima.

**Tabel 2. Hasil Uji Hausman Persamaan I**

Test Summary	Chi-Statistic	Sq.	Chi-Sq. d.f.	Probability
Cross-section random	1.043131		2	0.5936

Berdasarkan Tabel 2 pada hasil uji hausman persamaan I, *random effect model vs fixed effect model* diatas, diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0.5936 > 0.05$  maka H1 ditolak dan H0 diterima.

**Tabel 3. Hasil Uji Langrange Multiple Persamaan I**

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-pagan	17.59697 (0.0000)	0.352795 (0.5525)	17.94976 (0.0000)

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 dari uji lagrange multiplier persamaan I, *common effect model vs random effect model* diatas, diperoleh *cross section Breusch-pagan* 0.05 yaitu  $0.0000 < 0.05$  maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka Persamaan I diperoleh model yaitu REM (*Random Effect Model*).

**Tabel 4. Hasil Uji Chow Persamaan II**

Effect Test	Statistic	d.f.	Probability
Cross-section F	419.762380	(112,110)	0.0000
Cross-section Chi-Square	1369.570017	112	0.0000

Berdasarkan Tabel 4 pada hasil uji chow persamaan II, *common effect model vs fixed effect model* diatas, diperoleh nilai probabilitas (P-value) *cross section* sebesar  $0.0000 < 0.05$  maka H0 ditolak dan H1 diterima.

**Tabel 5. Hasil Uji Hausman Persamaan II**

Test Summary	Chi-Statistic	Sq.	Chi-Sq. d.f.	Probability
Cross-section random	10.097383		3	0.0178

Berdasarkan tabel 5 pada hasil uji hausman, *random effect model vs fixed effect model* diatas, diperoleh nilai probabilitas *chi-square* sebesar  $0.0178 < 0.05$  maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka Persamaan II diperoleh model yaitu FEM (*Fixed Effect Model*).

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Persamaan Regresi Model I**

Standardized residuals	
Mean	-0.0088387
Median	0.168043
Maximum	4.957839
Minimum	-10.95213
Std.dev	1.246620
Skewness	-3.376493
Kurtosis	31.35470
Jarque-bera	8000.326
Probability	0.000000

Melihat uji statistik Jarque-Bera (JB-Test) terlihat bahwa uji normalitas memiliki nilai probabilitas 0.000000 dimana nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0.05 yaitu  $0.000000 < 0.05$ ,

maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal. Akan tetapi, pada asumsi dalil batas tengah menyatakan apabila sampel sudah besar terutama untuk lebih dari 30 dan hasil tidak normal sedangkan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian besar maka hal tersebut akan cenderung memenuhi distribusi normal (Dielman, 1961).

**Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Persamaan Regresi Model II**

Series : standardized residuals	
Mean	0.241293
Median	0.555914
Maximum	13.97412
Minimum	-13.61031
Std.dev	4.630430
Skewness	-0.039269
Kurtosis	3.455109
Jarque-bera	2.008499
Probability	0.366319

Melihat uji statistik Jarque-Bera (JB-Test) terlihat bahwa uji normalitas memiliki nilai probabilitas 0.366319 dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0.05 yaitu 0.366319 > 0.05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Sehingga asumsi klasik untuk uji normalitas terpenuhi.

**Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Regresi Model I**

Model I	Pengeluaran Pemerintah (X1)	Indeks Pembangunan Manusia (X2)
Pengeluaran Pemerintah (X1)	1	0.20496885
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	0.20496885	1

**Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Regresi Model II**

Model II	Pengeluaran Pemerintah (X1)	Indeks Pembangunan Manusia (X2)	Pertumbuhan Ekonomi (M)
Pengeluaran Pemerintah (X1)	1	0.20496885	0.3756182
Indeks Pembangunan Manusia (X2)	0.20496885	1	0.30163452
Pertumbuhan Ekonomi (M)	0.3756182	0.30163452	1

Berdasarkan Tabel 8 dan Tabel 9, diketahui bahwa persamaan regresi model I dan II semua variable penelitian memiliki nilai nilai korelasi dibawah 0.80 sehingga dapat disimpulkan hasil korelasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficien	Std.error	t-statistic	Probability
C	5.25E-12	1.07E-16	4928.838	0.0000
X1	1.51E-18	9.23E-19	1.640069	0.1038
X2	7.74E-19	1.44E-18	0.536589	0.5926
M	9.38E-19	7.19E-19	1.303165	0.1952

Berdasarkan Tabel 10 terlihat nilai prob memiliki hasil lebih besar dari 0.05 dari variabel peneglauran pemerintah (X1) yaitu 0.1038, variabel indeks pembangunan manusia (X2) yaitu 0.5926 dan variabel pertumbuhan ekonomi (M) yaitu 0.1952. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastistas.

**Tabel 11. Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan Regresi Model I**

Variable	Coefficien	Std.error	t-statistic	Probability
C	-1.804803	1.477251	-1.221731	0.0000
X1	-0.008874	0.029212	-0.303787	0.7616
X2	0.078858	0.020180	3.907728	0.0001

<b>R-Squared</b>	0.065316
<b>Adjusted R-squared</b>	0.056933
<b>S.E of regression</b>	0.964846
<b>F-Statistic</b>	7.791599
<b>Prob(F-Statistic)</b>	0.000536

**Tabel 12. Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan Regresi Model II**

Variable	Coefficien	Std.error	t-statistic	Probability
<b>C</b>	64.64045	2.354576	27.45312	0.0000
<b>X1</b>	-0.005668	0.023757	-0.238586	0.8116
<b>X2</b>	0.348078	0.031700	10.98044	0.0000
<b>M</b>	0.001606	0.019252	0.083434	0.9336
<b>R-Squared</b>				
	0.345983			
<b>Adjusted R-squared</b>				
	0.337145			
<b>S.E of regression</b>				
	0.200078			
<b>F-Statistic</b>				
	39.14698			
<b>Prob(F-Statistic)</b>				
	0.000000			

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 11, diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000536 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, merujuk pada hasil uji F dalam Tabel 12, nilai probabilitas F-statistik tercatat sebesar 0.000000, yang juga berada di bawah ambang batas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai *Adjusted R-Square* pada Tabel 11 tercatat sebesar 0,056933. Ini berarti bahwa kombinasi variabel pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia hanya mampu menjelaskan variasi dalam variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69%, sementara sisanya sebesar 94,31% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model penelitian ini. Sementara itu, pada Tabel 12, *nilai Adjusted R-Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,337145. Artinya, ketiga variabel independen, yakni pengeluaran pemerintah, indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi, dapat menjelaskan sebesar 33,7% variasi dalam kesejahteraan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 66,3% disebabkan oleh faktor lain di luar model.

Dari hasil uji parsial pada Tabel 11, variabel pengeluaran pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar -0.008874 dengan nilai probabilitas 0.7616, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis pertama tidak dapat diterima.

Sebaliknya, pada Tabel 12, indeks pembangunan manusia menunjukkan koefisien sebesar 0.078858 dan nilai probabilitas sebesar 0.0001, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Hal ini menegaskan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis kedua dapat diterima.

Hasil selanjutnya yang ditampilkan dalam Tabel 12 menunjukkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan koefisien regresi -0.005668 dan nilai probabilitas sebesar 0.8116. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga hipotesis ketiga tidak didukung oleh data.

Terakhir, berdasarkan hasil analisis dalam Tabel 12, indeks pembangunan manusia memiliki nilai koefisien sebesar 0.348078 dengan nilai probabilitas 0.0000. Karena nilai probabilitas berada jauh di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis keempat dapat diterima.

**Tabel 13. Ringkasan Uji Sobel untuk Hipotesis 5 dan 6**

Pengaruh Variabel	Koefisien	Sab	Z hitung
<b>Hipotesis 5</b>	-0.00001425	2.877936	-0.00004951
<b>Hipotesis 6</b>	0.00012664	1.598814	0.00007921

Berdasarkan hasil analisis yang ditampilkan pada Tabel 13, diperoleh nilai  $z$  sebesar -0.00004951. Nilai ini berada di bawah ambang signifikansi 0,05, yang mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki peran sebagai mediator dalam hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) tidak dapat diterima atau tidak mendapat dukungan dari data.

Selanjutnya, hasil uji yang sama dalam Tabel 13 menunjukkan bahwa nilai  $z$  sebesar 0.00007921 juga lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan memediasi hubungan antara indeks pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis keenam (H6) juga tidak didukung oleh temuan penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil dari pengujian hipotesis pertama (H1) mengindikasikan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa bersifat negatif dan tidak signifikan. Dengan demikian, tidak ditemukan bukti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah berkorelasi secara positif dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengeluaran publik, khususnya belanja tidak langsung, cenderung tidak mendorong aktivitas ekonomi (17) dan (35). Sebagian besar belanja tidak langsung digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan kebutuhan rutin lainnya, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Hal ini mendukung pandangan bahwa belanja publik yang bersifat konsumtif dan tidak produktif hanya memiliki sedikit dampak dalam mempercepat aktivitas ekonomi (35). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran pemerintah di Pulau Jawa pada tahun 2022 menunjukkan proporsi yang signifikan pada belanja yang bersifat administratif dan konsumtif, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah, realisasi belanja pegawai mencapai Rp112,8 triliun, sementara belanja barang dan jasa sebesar Rp121,1 triliun. Di Provinsi Jawa Timur, belanja tidak langsung, yang mencakup belanja pegawai dan belanja hibah, mendominasi struktur pengeluaran pemerintah. Proporsi pengeluaran yang lebih besar pada belanja administratif ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pemerintah di Pulau Jawa belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan yang produktif, seperti belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam teori Peacock-Wiseman, yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah cenderung meningkat akibat tekanan sosial dan politik, namun tidak selalu diarahkan pada investasi produktif.

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan IPM pada tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil ini selaras dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan determinan utama pertumbuhan ekonomi (12) dan (22). Teori klasik tentang pembangunan manusia juga menekankan bahwa perbaikan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas ekonomi. Pembangunan manusia harus menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Hasil uji hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki hubungan yang signifikan dan bahkan menunjukkan korelasi negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran fiskal di tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa belum mampu secara efektif meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian sebelumnya menguatkan temuan ini, dengan menyatakan bahwa besarnya anggaran pemerintah tidak menjamin peningkatan kesejahteraan jika tidak dibarengi dengan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaannya (14) dan (21). Keterbatasan teknis, administratif, dan kapasitas pengelolaan anggaran di daerah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan sosial.

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Hipotesis keempat (H4) terkonfirmasi dengan adanya pengaruh positif dan signifikan dari IPM terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan berdampak pada penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (27). Teori yang dikemukakan oleh Schultz (1961) juga memperkuat pandangan bahwa investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan instrumen strategis dalam mencapai kesejahteraan sosial secara luas (2).

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Mediasi**

Uji hipotesis kelima (H5) dengan pendekatan Sobel test memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan memediasi hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pengeluaran pemerintah meningkat, jika alokasi anggarannya tidak diarahkan ke sektor produktif, maka pertumbuhan ekonomi tidak cukup kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran belanja langsung yang lebih besar dapat berdampak lebih baik dibandingkan belanja tidak langsung, tetapi efektivitas implementasinya sangat penting (7). Selain itu, seperti yang dijelaskan penelitian sebelumnya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran akan menghambat realisasi manfaat ekonominya (23).

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Mediasi**

Hipotesis keenam (H6) juga tidak terbukti, di mana pertumbuhan ekonomi tidak menjadi variabel mediasi yang signifikan antara IPM dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, meskipun IPM mengalami peningkatan, hal tersebut belum secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kemudian mendorong kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemungkinan karena dampak peningkatan IPM bersifat jangka panjang dan memerlukan waktu sebelum memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi. Dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan agar dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan ekonomi di masa depan (37).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Temuan dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa belanja pemerintah tidak memiliki dampak yang signifikan baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap kedua variabel tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berperan sebagai mediator dalam menjembatani pengaruh pengeluaran pemerintah maupun IPM terhadap kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah penting bagi pemerintah daerah di Pulau Jawa untuk meninjau kembali alokasi anggaran mereka, dengan meningkatkan proporsi belanja modal guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini juga menegaskan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia memegang peran strategis sebagai kunci utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### **Saran**

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain periode observasi yang relatif singkat, yaitu hanya mencakup tahun 2022 hingga 2023, serta fokus wilayah yang terbatas pada kawasan Pulau Jawa. Nilai adjusted R square hasil analisis statistik masih rendah yaitu sebesar 5,6% pada model pengujian pertama dan 33% pada model pengujian kedua. Ini disebabkan oleh terbatasnya variabel yang digunakan, sementara ada variabel lain yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk:

1. Memperluas cakupan waktu dan lokasi penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat merepresentasikan kondisi yang lebih luas dan beragam.

2. Memasukkan variabel-variabel tambahan seperti tingkat inflasi, jumlah investasi, ketimpangan distribusi pendapatan, serta indeks persepsi korupsi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
3. Menggunakan pendekatan kualitatif, misalnya melalui wawancara dengan pemangku kebijakan atau stakeholder terkait, agar diperoleh perspektif mendalam mengenai dinamika kebijakan dan dampaknya.
4. Melakukan pemilahan jenis belanja pemerintah berdasarkan klasifikasi fungsional atau sektoral, untuk mengetahui dampak spesifik dari masing-masing jenis belanja terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.
5. Melakukan pengujian hipotesis hubungan langsung pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alia Akhmad, K. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(6), 173–181. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/419>
- [2] Alifia, R. N., & Khusaini, M. (2024). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 0, 1–18. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i1.21744>
- [3] Anantika, Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara Apec. *Diponegoro Journal Of Economics* <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme> Volume, 9, 167–178.
- [4] Arifin, A. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020). *E-Qien : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 461–467.
- [5] Badan Pusat Statistik Indonesia 2023. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat. *Badan Pusat Statistik*.
- [6] Bawonob, I. R., Sudibyoc, Y. A., & Cesarina, L. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ekuilibrum: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 16, No. 1 (2021): March, Pp. 24-38 Economic Faculty, Universitas Muhammadiyah Ponorogo P- Issn1858-165x*, 16(1), 24–38.
- [7] Dewi, N. W. D. M. K., & Made Heny Urmilah. (2020). Pengaruh Belanja Daerah Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ep Unud*, 10(1), 334–360.
- [8] Dzulhijiy, I. M. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Dan Kesehatan. *Jurnal Ilmiah*.
- [9] Gaffar, E. N. H. (2022). Analysis Of Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, 05(07), 38–46. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i7-04>
- [10] Hasibuan, S. A., Syahbudi, M., Islam, P. E., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 1158–1166.
- [11] Indrajaya, I. G. B., & Pratiwi, N. P. A. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*, 220. <https://doi.org/10.24843/Bse.2019.V24.I02.P05>
- [12] Isnaini, A., Nur Sarviah, S., & Dwi Ratnasari, E. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Tenaga Kerja, Rasio Ketergantungan Dan Rasio Jenis Kelamin Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Tahun 2015-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(3), 601–614. <https://doi.org/10.55047/Transekonomika.V3i3.432>

- [13] Jean, J., & Mongan, S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4, 163–176.
- [14] Juma'eh, Harin Tiawon, & Alexandra Hukom. (2020). Analisis Kapasitas Fiskal Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal Of Environment And Management*, 1(1), 40–45. <https://doi.org/10.37304/Jem.V1i1.1204>
- [15] Koilam, K. Dan R. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pengeluaran Konsumsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(5), 25–36.
- [16] Litriani, E. (2021). Korelasi Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 10(1), 80–87. <http://dx.doi.org/10.12244/jies.2021.5.1.001>
- [17] Mamuane, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(02), 205–216. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/36080/33597>
- [18] Nainggolan, Sembiring, N. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Berdampak Pada Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Ejurnal Binawakya* <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/mbiopen>, 15(10), 5457–5474.
- [19] Nugroho, Syahnur, S. (2022). The Impact Of Real Government Spending In Physical And Social Infrastructures On Economic Growth. *Indonesian Treasury Review Journal Of Treasury, State Finance And Public Policies*, 7(2022), 287–300.
- [20] Panggabean, M., Ria, E., & Matondang, L. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah , Indeks Pembangunan Manusia ( Ipm ), Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017. *Prosiding Satiesp, isbn: 978-602-53460-3-3*, 154–164.
- [21] Prakasa, G. S., & Suparyati, A. (2022). Dampak Efektivitas Dan Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Sektor Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Jawa. *Media Ekonomi*, 30(1), 16–29. <https://doi.org/10.25105/Me.V30i1.10133>
- [22] Prameswari, A., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(2), 168–179.
- [23] Pratama, N. R. N. S., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 [7](2337–3067), 651–680.
- [24] Riviando, Adel, A. Dan H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 1–17.
- [25] Rizky Nanda, M. K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating. *Jdess 03.02.2024*, 3(2), 427–437.
- [26] Safitri, M. I. D. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.33105/ltrev.V6i2.339>

- [27] Salsabila, A., Ramadhani, Z., Purba, G., & Zuanda, M. A. (2025). *Peran Indeks Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Terhadap Kemiskinan Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia*.
- [28] Sandrayati, Yuli Antina Aryani, R. R. S. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Diversifikasi Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Sumatera Selatan. *Bridging: Journal Of Islamic Digital Economic And Management Issn: 3025-9177*, 1(2), 11–25.
- [29] Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65–89. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>
- [30] Sope, I. I., Koleangan, R. A. M., Wauran, P. C., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 99–109.
- [31] Sutono, I. A., Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, K. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(2), 150–168. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i2.463>
- [32] Syam, A. Y., & Chandrarin, G. (2019). Effects Of Fiscal Health On Human Development Index In Indonesia: Regional Government Performance Mediating Role. *International Journal Of Innovative Science And Research Technology*, 4(10).
- [33] Tampubolon, E. G. (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Sosio E-Kons*, 11(1), 79–89.
- [34] Tio Andri Prasetyo, A. D. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa Dan Indeks Pembangunan Manusia Per Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 375–391. <https://doi.org/10.33105/ltrev.v6i4.336>
- [35] Tjodi, A. M. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(8).
- [36] Wahyudi. (2018). Dampak Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Penduduk Di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Satesp 2018 Feb Universitas Tanjungpura*, 144–156.
- [37] Wididarma, K., & Jember, M. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(7), 2982–3010.
- [38] Wiratmoko, A. O. T., & Purwanti, L. (2023). Impact Of Government Expenditure On Human Development Index In Indonesia By Functions. *The Euraseans: Journal On Global Socio-Economic Dynamics*, 6(6(43)), 191–201. [https://doi.org/10.35678/2539-5645.6\(43\).2023.191-201](https://doi.org/10.35678/2539-5645.6(43).2023.191-201)
- [39] Hakzah, H., Yusuf, S., & Pawelloi, A. I. (2022). The Importance of Motorcycle Taxi Transport of Agricultural Products and Operator Income in Indonesia. *The Open Transportation Journal*, 16(1).
- [40] Arfianty, A., Arodhiskara, Y., Rosadi, I., & Fatimah, F. (2022). Good Corporate Governance Principles And Company Value: The Impact Of Financial Performance. In *Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics, ICBAE 2022, 10-11 August 2022, Purwokerto, Central Java, Indonesia*.
- [41] Badan Pusat Statistik. (2023b). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, 2021–2023. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg1zl%3D/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jjwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>

- [42] Badan Pusat Statistik. (2023c). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Siaran Pers No. 54/07/Th. XXVI, 17 Juli 2023. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> You said:
- [43] Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- [44] Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1961). *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*. Princeton University Press.
- [45] Tanzi, V., & Schuknecht, L. (2000). *Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective*. Cambridge University Press.
- [46] United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier—Human Development and the Anthropocene*. New York: UNDP.